

Penguatan Identitas Lokal dan Sinkronisasi SDGs dalam Perencanaan Pembangunan Desa Partisipatif di Era Digital

Ahmad Imron Rozuli ¹⁾; Dano Purba ²⁾; Ryan Renwarin ³⁾

^{1,2,3)} Sosiologi, Universitas Brawijaya

Email: ¹ imron@ub.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [15 Juni 2026]

Revised [17 Juli 2026]

Accepted [21 Juli 2026]

KEYWORDS

Village Sdgs, Local Identity, Participatory Planning, Thematic Village, Village Digitalization.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Sustainable Development Goals (SDGs) Desa merupakan kebijakan nasional yang mewajibkan desa melakukan pendataan 18 indikator pembangunan berkelanjutan sebagai basis perencanaan pembangunan. Namun, banyak desa mengalami kebingungan dalam menganalisis data SDGs, mensinkronkan dengan dokumen perencanaan, serta mengidentifikasi kekhasan lokal sebagai identitas pembangunan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat identitas lokal dan menyinkronkan SDGs dengan perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Metode yang digunakan adalah Participatory Rural Appraisal melalui Focus Group Discussion, analisis SWOT, pemetaan pemangku kepentingan, dan kalender musim. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Desa Sumberdem memiliki kekhasan lokal berupa enam kampung tematik yang lahir dari inisiatif masyarakat (bottom-up), serta sejarah kopi sejak 1832 yang terarsip di Belanda. Sinkronisasi dengan RPJMDes 2019-2025 dan RKPDes 2022 menghasilkan lima prioritas indikator SDGs yang relevan: pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, industri dan inovasi, penguatan kelembagaan, serta kemitraan. Kegiatan pendampingan berhasil memutus kebiasaan perencanaan instan dan membangun perencanaan berbasis data melalui visualisasi video perencanaan dan publikasi media massa. Pengabdian ini menyimpulkan bahwa pendekatan integratif antara penggalian identitas lokal, analisis SDGs, dan sinkronisasi dokumen perencanaan efektif dalam memperkuat kapasitas desa menyusun perencanaan pembangunan yang kontekstual dan berkelanjutan.

ABSTRACT

The Village Sustainable Development Goals (SDGs) mandate villages to collect data on 18 sustainable development indicators as a foundation for development planning. However, many villages encounter difficulties in analyzing SDGs data, synchronizing it with planning documents, and identifying local distinctiveness as a developmental identity. This community service activity aims to strengthen local identity and synchronize SDGs with participatory development planning in Sumberdem Village, Wonosari District, Malang Regency. The method employed Participatory Rural Appraisal through Focus Group Discussion, SWOT analysis, stakeholder mapping, and seasonal calendars. The results revealed that Sumberdem Village possesses local distinctiveness in the form of six thematic villages initiated by the community (bottom-up), along with coffee history dating back to 1832 archived in the Netherlands. Synchronization with the Medium-Term Village Development Plan 2019-2025 and the Village Government Work Plan 2022 resulted in five priority SDG indicators: poverty alleviation, economic growth, industry and innovation, institutional strengthening, and partnership. The mentoring activities successfully replaced the habit of instant planning with data-based planning, visualized through planning videos and mass media publications. This community service concludes that an integrative approach combining local identity exploration, SDGs analysis, and planning document synchronization effectively strengthens village capacity in developing contextual and sustainable development planning.

PENDAHULUAN

Paradigma pembangunan yang semula berfokus pada pertumbuhan ekonomi makro terbukti melahirkan permasalahan sosial seperti kesenjangan, kerusakan lingkungan, dan kerentanan sosial budaya masyarakat lokal (Iskandar, 2020). Kegagalan pendekatan pembangunan yang sentralistik dan berorientasi pertumbuhan semata mendorong munculnya strategi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang kemudian diadopsi secara global dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs). Di tingkat nasional, Indonesia merespons agenda global tersebut melalui kebijakan SDGs Desa, sebuah pendekatan yang dirancang untuk membawa tujuan pembangunan berkelanjutan ke tingkat desa dengan tetap memperhatikan kearifan dan kebutuhan lokal masyarakat pedesaan. Konsep SDGs Desa sendiri dilahirkan oleh individu yang lahir, tumbuh, dan tinggal di desa, sehingga memiliki pemahaman mendalam tentang isu dan kebutuhan masyarakat pedesaan, serta dirancang untuk sangat praktis diimplementasikan.

Kebijakan SDGs Desa merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional. Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai landasan operasional bagi desa dalam melaksanakan pembangunan berbasis SDGs. SDGs Desa menegaskan fokus isu utamanya terhadap kemiskinan, kelaparan, kesenjangan sosial, ekonomi berkelanjutan dan adil, serta perlindungan sumber daya alam dengan 18 indikator yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat desa, mulai dari kesehatan, kesejahteraan, budaya, ekologi, air, keamanan, hingga kenyamanan (Suprianto, 2022). Melalui SDGs Desa, diterapkan perencanaan partisipatif untuk membangun desa yang mengadopsi kearifan lokal dengan tujuan agar desa dapat menyediakan data yang akurat mengenai pencapaian SDGs di tingkat desa yang selanjutnya digunakan sebagai input dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan desa sendiri telah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat. Undang-undang ini menempatkan masyarakat desa sebagai aktor aktif dalam perencanaan pembangunan dengan hak untuk meminta dan mendapatkan informasi, memperoleh pelayanan, menyampaikan aspirasi, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Desain pembangunan saat ini mengedepankan partisipasi aktif masyarakat desa, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi, di mana partisipasi yang tidak hanya bersifat normatif melalui forum formal, tetapi lebih pada kualitas keterlibatan masyarakat. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan secara partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) dan menetapkan skala prioritas pembangunan berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, implementasi perencanaan partisipatif di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian oleh Akbar et al. (2020) menemukan adanya ketidakselarasan antara praktik Musrenbang dan kriteria evaluasi partisipatif yang ideal yang disebabkan oleh masalah seperti jadwal perencanaan yang tidak sesuai regulasi, kurangnya integrasi pengetahuan dan proses pembelajaran, serta perebutan kekuasaan antar pemangku kepentingan. Rahmaddhani dan Prasetyoningsih (2023) dalam penelitiannya di Tirtonirmolo, Bantul, mengungkapkan bahwa hambatan utama implementasi SDGs Desa terletak pada tahap pengumpulan data, di mana kualitas sumber daya manusia aparatur desa dalam memahami teknologi masih menjadi kendala utama. Secara lebih luas, tinjauan terhadap perencanaan pembangunan desa di Indonesia mengidentifikasi bahwa efektivitas perencanaan dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu partisipasi masyarakat yang masih terbatas dalam pemahaman dan mekanisme musyawarah, kapasitas kelembagaan yang lemah di tingkat desa, serta pemanfaatan teknologi yang masih suboptimal meskipun memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi perencanaan dan pemantauan program.

Berbagai kegiatan pengabdian masyarakat telah dilakukan untuk menjawab tantangan implementasi SDGs Desa di berbagai daerah. Suprianto (2022) melaporkan pendampingan pemutakhiran data SDGs Desa di Ngadirejo, Magelang, yang dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu koordinasi, pra-perencanaan, dan pelaksanaan pemutakhiran data SDGs Desa dengan melibatkan mahasiswa UNNES GIAT 3. Kegiatan ini bertujuan meringankan beban kerja Kepala Desa selaku penanggung jawab pemutakhiran data SDGs Desa. Di Desa Gadu, Blora, Ngabiyanto et al. (2025) melakukan sosialisasi penyusunan program pembangunan desa berbasis SDGs serta pendampingan perencanaan pembangunan desa yang mengacu pada indikator SDGs sesuai regulasi nasional. Hasilnya, masyarakat dan perangkat desa mampu merancang program-program strategis dalam mendorong percepatan pencapaian SDGs Desa. Sementara itu, pengabdian di Desa Rembun, Pekalongan, difokuskan pada pengembangan UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital dan strategi *branding* yang menunjukkan bahwa dengan penerapan strategi *branding* yang efektif, kesadaran merek dan aksesibilitas produk meningkat.

Kegiatan pengabdian lainnya menyoroti pentingnya penguatan identitas lokal dan pengembangan kampung tematik. Penelitian-penelitian tentang pengembangan kampung tematik di wilayah Malang menunjukkan bahwa kampung tematik menjadi salah satu inovasi strategis dalam mendorong pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal, seperti budaya, kerajinan, sejarah, dan pariwisata (Muluk et al., 2025). Penguatan kampung tematik tidak dapat mengandalkan pemerintah saja, melainkan peran serta Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan masyarakat juga menjadi elemen utama. Meskipun berbagai kegiatan pengabdian telah dilakukan, masih terdapat kebutuhan untuk mengembangkan model pendampingan yang lebih integratif yang tidak hanya fokus pada satu aspek tertentu, melainkan menggabungkan penguatan identitas lokal, sinkronisasi SDGs dengan dokumen perencanaan desa, serta pemanfaatan teknologi digital untuk publikasi dan visualisasi perencanaan secara simultan.

Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, dipilih sebagai lokus pengabdian karena memiliki potensi besar di bidang perkebunan dan pertanian dengan luas lahan 437,87 Ha yang

didominasi perkebunan (199 Ha) dan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani (1.422 orang) serta wiraswasta (1.268 orang). Berdasarkan hasil asesmen awal yang dilakukan melalui pendekatan struktural dan kultural terhadap pemerintah desa, tim pengabdian menemukan empat permasalahan utama yang dihadapi oleh Desa Sumberdem. *Pertama*, pemerintah desa mengalami kebingungan dalam menganalisis data SDGs Desa yang telah diinput oleh *volunteer* ke dalam sistem Kementerian Desa PDTT, terutama dalam mengidentifikasi kekhasan desa dari sisi potensi dan kebudayaan masyarakat. *Kedua*, masih terkendalanya kapasitas sumber daya pemuda desa dalam hal penulisan sejarah desa dan pengungkapan unsur sosial budaya masyarakat secara holistik, serta belum terbiasanya pola perencanaan desa yang berbasis riset. *Ketiga*, kebiasaan pemerintah desa yang merumuskan program desa hanya dengan mengandalkan dokumen perencanaan tahun sebelumnya tanpa dilandasi analisis data dan kajian empiris, sehingga tidak ada proses refleksi ataupun kajian apakah usulan program desa benar-benar sesuai sasaran. *Keempat*, belum terkelola dan terdokumentasi secara visual terkait potensi desa yang meliputi perkebunan, budaya, pertanian, pertanahan, pariwisata, serta indikator SDGs lainnya yang disebabkan oleh adaptasi aparatur yang masih lambat terhadap sistem jaringan informasi dan teknologi.

Secara lebih spesifik, berdasarkan hasil wawancara oleh tim pengabdian di lapangan, ditemukan bahwa pemerintah desa menginginkan adanya sudut pandang dari kalangan akademisi yang bisa menjelaskan konteks sosial-budaya masyarakat secara murni yang bersumber dari masyarakat. Mereka menginginkan suatu ruang publik yang dapat menjadi sarana masyarakat untuk berkumpul sekaligus sebagai sarana olahraga serta membuka peluang usaha mikro pada warga sekitar, namun belum menemukan titik keterhubungan antara dokumen RPJMDes dan RKPDes, terutama dalam mengkaitkan dengan isu-isu SDGs. Di sisi lain, desa ini memang mempunyai potensi perkebunan kopi, cengkeh, dan hasil pertanian lainnya, namun para petani kurang inovatif dalam memanfaatkan limbah-limbah kebun dan masih banyak yang menjual hasil panen kepada tengkulak. Padahal secara kualitas kopi yang dihasilkan tidak begitu jelek serta masih bisa bersaing dengan pasar, namun para petani kopi kebingungan mencari pasar dan lebih memilih sasaran pasar yang pasti. Selain itu, terkait dengan status lahan perkebunan yang dikontrol oleh swasta dan PTPN XI menjadikan warga susah untuk bebas mengembangkan komoditas.

Permasalahan-permasalahan di atas tidak hanya dialami oleh Desa Sumberdem, tetapi merupakan masalah umum yang dihadapi oleh sebagian besar desa di Indonesia. Hal ini menjadikan kegiatan pengabdian ini memiliki nilai replikatif dan kontribusi yang luas bagi pengembangan model pendampingan perencanaan desa berbasis SDGs. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis data SDGs Desa guna menemukan dan memperkuat kekhasan lokal Desa Sumberdem; (2) meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan pemangku kepentingan lokal dalam perencanaan pembangunan berbasis SDGs melalui kegiatan *capacity building*; (3) mensinkronkan hasil analisis SDGs dengan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes); (4) memvisualisasikan arah perencanaan pembangunan desa yang berbasis kekhasan lokal dan SDGs melalui media digital; serta (5) mempublikasikan rencana pembangunan desa kepada masyarakat luas melalui berbagai kanal komunikasi. Dengan demikian, pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan model pendampingan perencanaan desa yang integratif, partisipatif, dan berkelanjutan, serta memperkaya khazanah keilmuan di bidang sosiologi pedesaan, sosiologi perencanaan, dan studi pembangunan partisipatif.

METODE

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi didasarkan pada kebutuhan desa dalam menganalisis data SDGs dan mensinkronkannya dengan dokumen perencanaan, potensi lokal yang beragam di bidang perkebunan dan pertanian, serta komitmen pemerintah desa untuk bekerja sama dengan akademisi. Sasaran kegiatan meliputi pemerintah desa, 17 orang *volunteer* SDGs, pengurus BUMDes, pengelola 6 kampung tematik, Pokdarwis, serta tokoh masyarakat dan pemuda desa. Penentuan sasaran dilakukan secara purposif berdasarkan peran dan keterlibatan mereka dalam proses perencanaan pembangunan dan implementasi SDGs.

Pengumpulan data dilakukan melalui empat teknik yang saling melengkapi:

Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan di Balai Desa Sumberdem, dihadiri peserta yang terdiri atas Sekretaris Desa, Ketua BUMDes, Ketua Pengelola Kampung Kopi, *volunteer* SDGs, perwakilan pengelola kampung tematik, dan tim pengabdian. FGD dilaksanakan dalam empat tahapan: pemaparan tujuan dan hasil asesmen awal, diskusi permasalahan implementasi SDGs dan kendala di lapangan, identifikasi dan pemetaan isu strategis desa, serta perumusan kesepakatan kekhasan lokal dan prioritas indikator SDGs.

Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci, yaitu Kepala Desa (arah kebijakan pembangunan), Sekretaris Desa (dokumen perencanaan dan kendala teknis), Ketua BUMDes (pengembangan usaha mikro dan kemitraan dengan BRI), Ketua Pengelola Kampung Kopi (sejarah kopi dan stigma pasar), serta dua orang *volunteer* SDGs (pengalaman dan kendala pendataan). Wawancara menggunakan pendekatan semi-terstruktur dengan pedoman wawancara dan didokumentasikan melalui catatan tertulis dan rekaman audio.

Analisis data sekunder dilakukan terhadap Profil Desa 2017, RPJMDes 2019-2025, RKPDes 2022, data SDGs yang telah diinput *volunteer*, serta dokumen dari BPS Kabupaten Malang dan Kecamatan Wonosari. Observasi lapangan dilakukan untuk mengamati kondisi riil enam kampung tematik (kopi, KRPL, rosella, toga, ternak, dan bunga), infrastruktur desa, aktivitas ekonomi, dan interaksi sosial masyarakat, yang didokumentasikan melalui catatan lapangan dan foto.

Analisis data menggunakan tiga instrumen partisipatif:

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman Desa Sumberdem, yang kemudian dirumuskan menjadi empat strategi utama, yaitu mensinergikan RKPDes 2022 dengan BUMDes dan Pokdarwis; mewujudkan pembangunan yang merangkul semua pihak melalui atraksi wisata dan publikasi media sosial; mensinkronkan kegiatan BUMDes dan Pokdarwis untuk pengembangan kampung tematik; serta memasukkan atraksi wisata ke dalam RKPDes 2023-2024 dan RPJMDes 2026-2030. Analisis *stakeholder* dilakukan untuk memetakan aktor-aktor yang berperan dalam pengembangan potensi desa dan implementasi SDGs beserta hubungan keterkaitannya. Kalender musim digunakan untuk memetakan aktivitas masyarakat secara musiman (cuaca, tanam-panen, ekonomi, sosial, dan sosiokultural) yang memiliki keterkaitan dengan indikator SDGs.

Data kualitatif dari FGD dan wawancara dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan) (Miles et al., 2014). Data kuantitatif SDGs dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi prioritas indikator berdasarkan urgensi masalah, keterkaitan dengan potensi lokal, dan kesesuaian dengan dokumen perencanaan. Proses sinkronisasi hasil analisis SDGs dengan dokumen perencanaan dilakukan melalui diskusi partisipatif yang melibatkan tim penyusun RPJMDes dan RKPDes, pemerintah desa, serta BUMDes, untuk merumuskan program pembangunan yang sesuai.

Pendampingan dilaksanakan melalui metode luring di Balai Desa dengan tema: tata kelola perencanaan desa berbasis SDGs, pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan kampung tematik, dan penguatan kapasitas kelembagaan BUMDes dan Pokdarwis. Pendampingan terintegrasi dengan FGD dalam empat sesi: pemaparan hasil analisis SDGs dan temuan kekhasan lokal, peningkatan pemahaman 18 indikator SDGs, penyusunan program berbasis SDGs dan kekhasan lokal, serta praktik pembuatan konten visual dan publikasi potensi desa melalui media sosial.

Tahap akhir adalah pembuatan video visualisasi perencanaan pembangunan desa berbasis kekhasan lokal dan SDGs, yang meliputi pengumpulan data visual, perumusan skenario dan narasi, pengambilan gambar, editing, dan validasi konten oleh pemerintah desa. Publikasi hasil dilakukan melalui media massa cetak dan online serta media sosial dan website desa.

Keberhasilan kegiatan diukur melalui indikator: (1) tersusunnya dokumen analisis SDGs yang mengidentifikasi kekhasan lokal; (2) meningkatnya pemahaman pemerintah desa dan *volunteer* tentang SDGs dan isu strategis desa; (3) ditemukannya keterhubungan antara hasil SDGs dengan RKPDes dan RPJMDes; (4) terproduksinya video perencanaan desa berbasis SDGs dan kekhasan lokal; serta (5) terpublikasikannya rencana kegiatan desa berbasis SDGs. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui rapat koordinasi antara tim pengabdian, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Sumberdem dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang terencana dan terstruktur, mulai dari pra-kegiatan, pelaksanaan FGD dan pendampingan, hingga publikasi hasil. Secara keseluruhan, kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan berhasil mencapai target-target yang telah ditetapkan. Bagian ini menyajikan hasil-hasil yang telah diperoleh dari proses pendampingan dan analisis data, serta pembahasan yang membandingkan temuan-temuan tersebut dengan konsep, teori, dan hasil kegiatan pengabdian serupa.



(Sumber: Dokumentasi kegiatan pengabdian)

Gambar 1. Kegiatan FGD dan Pemetaan Potensi Desa Sumberdem

Hasil Aktivitas

Temuan Kekhasan Lokal Desa Sumberdem

Melalui serangkaian FGD, wawancara mendalam, dan observasi lapangan, tim pengabdian berhasil mengidentifikasi kekhasan lokal Desa Sumberdem yang menjadi identitas dan potensi utama desa. Temuan paling signifikan adalah terungkapnya sejarah panjang kopi Sumberdem yang telah dikenal sejak masa kolonial Belanda. Berdasarkan penuturan Ketua Pengelola Kampung Kopi (Bapak Sukat), kopi Sumberdem telah diekspor ke Belanda sejak tahun 1832 dengan bukti arsip yang tersimpan di Leiden, Belanda. Fakta historis lainnya yang terungkap adalah bahwa pada tahun 1900, ketika wabah karat daun melanda seluruh perkebunan kopi di Indonesia, tanaman kopi di Sumberdem justru terbukti lebih tahan dan tidak terdampak. Pada tahun 1911, Raden Sumorejo diangkat sebagai kepala urusan administrasi tanah dengan tongkat komando yang memiliki mahkota Pakubuwono X yang dikelilingi delapan pohon kopi, melambangkan hubungan erat antara kopi Sumberdem dengan sejarah kerajaan Jawa.

Namun demikian, kopi Sumberdem menghadapi stigma negatif yang berat akibat dominasi para tengkulak dan *plat merah* yang menyebarkan narasi bahwa kopi dari wilayah Gunung Kawi, termasuk Sumberdem berkualitas rendah. Stigma ini mengakibatkan harga kopi Sumberdem selalu mengikuti harga kopi Dampit yang lebih rendah, meskipun secara kualitas, kopi Sumberdem dinilai lebih baik. Kondisi ini menggambarkan bagaimana relasi kuasa dalam rantai pasok komoditas pertanian mampu mengkonstruksi persepsi pasar dan menghancurkan nilai ekonomi sebuah produk lokal.

Selain kopi, Desa Sumberdem memiliki enam kampung tematik yang lahir dari inisiatif masyarakat (*bottom-up*) dan menjadi kekhasan lokal yang membedakan desa ini dari desa-desa lain di sekitarnya. Keenam kampung tematik tersebut beserta produk unggulannya disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kampung Tematik dan Produk Unggulan Desa Sumberdem

No	Kampung Tematik	Produk Unggulan	Capaian dan Status
1	Kampung Rosella	Stik rosella, minuman rosella, dodol rosella	P-IRT terdaftar, proses BPOM 80%, dipasarkan melalui BUMDes
2	Kampung Bunga	Tanaman hias (mawar, palem, berbagai bunga)	Kerjasama CSR BRI untuk dekorasi bunga di unit BRI
3	Kampung KRPL	Sayuran (kangkung, kubis, cabe, terong)	Sistem penanaman per blok, mendukung ketahanan pangan
4	Kampung Toga	Minuman herbal instan (temulawak, jahe, kelor)	P-IRT terdaftar, permintaan meningkat saat pandemi
5	Kampung Ternak	Kambing etawa, sapi, ayam	Kluster utama BRI, tingkat kredit macet nol
6	Kampung Kopi	Kopi arabika dan robusta	Sejarah sejak 1832, terancam stigma negatif

Sumber: Hasil FGD dan wawancara mendalam

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa masing-masing kampung tematik memiliki keunggulan spesifik yang saling melengkapi. Kampung Rosella misalnya, telah berhasil mengolah bunga rosella menjadi berbagai produk olahan seperti stik, minuman, dan dodol, dengan dukungan BUMDes dalam pengurusan perizinan P-IRT dan BPOM. Kampung Ternak menjadi primadona karena berhasil menjalin kemitraan dengan BRI melalui program kredit kluster dengan tingkat pengembalian yang sangat baik (nol kredit macet). Kampung Toga mengalami peningkatan permintaan yang signifikan selama masa pandemi COVID-19 karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi herbal.

Hasil FGD juga mengungkapkan bahwa kampung tematik tersebut tidak lahir dari instruksi pemerintah desa, melainkan dari inisiatif komunitas-komunitas lokal. Kampung Kopi, misalnya, diawali dari komunitas pecinta kopi yang kemudian memperluas gerakannya menjadi sebuah kampung tematik. Kampung Rosella lahir dari kesepakatan komunitas untuk menanam rosella yang kemudian berkembang menjadi pengolahan dan pemasaran produk. Pola *bottom-up* ini menunjukkan adanya agen perubahan di tingkat masyarakat yang menjadi motor penggerak pembangunan partisipatif. Pemerintah desa dan BUMDes berperan sebagai fasilitator yang membantu pengurusan perizinan, pengembangan kapasitas, dan perluasan akses pasar.



(Sumber: Data sekunder dan dokumentasi)

Gambar 2. Potensi Kampung Tematik Desa Sumberdem

Analisis Data SDGs dan Prioritas Indikator

Berdasarkan hasil diskusi dengan *volunteer* SDGs Desa dan analisis terhadap data yang telah diinput ke dalam sistem Kementerian Desa PDTT, tim pengabdian mengidentifikasi beberapa kendala utama yang dihadapi selama proses pengumpulan data, sekaligus menentukan prioritas indikator SDGs yang paling relevan dengan kondisi Desa Sumberdem.

Volunteer SDGs Desa melaporkan bahwa kendala terbesar dalam pengumpulan data adalah ketidakjujuran responden dalam menjawab pertanyaan terkait pendapatan. Masyarakat cenderung menjawab *minus* atau enggan menyebutkan angka riil, sehingga *volunteer* harus menyiasati dengan menghitung pendapatan berdasarkan total pengeluaran dan tabungan dalam satu bulan. *Volunteer* juga menghadapi sikap apatis dari warga yang menganggap bahwa pendataan tidak akan membawa dampak positif bagi kehidupan ekonomi mereka. Bahkan, tidak jarang *volunteer* mendapat respons kemarahan ketika mengajukan pertanyaan seputar penghasilan. Untuk mengatasi hal ini, *volunteer* melakukan pendekatan yang lebih kultural dengan menyesuaikan waktu wawancara pada saat warga sedang tidak bekerja atau pada saat *cangkru'an* (santai bersama), serta mendapatkan dukungan legalitas dari pemerintah desa.

Dari 18 indikator SDGs yang tersedia, tim pengabdian bersama pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya menyepakati lima indikator prioritas yang paling relevan dan mendesak untuk diintervensi melalui perencanaan pembangunan desa. Kelima indikator tersebut disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Prioritas Indikator SDGs Desa Sumberdem

Indikator SDGs	Kondisi di Desa Sumberdem	Keterkaitan dengan Program Desa
(1) Tanpa Kemiskinan	Jumlah penduduk tidak bekerja 2.067 orang, mayoritas bekerja sebagai petani dengan pendapatan tidak pasti	Pengembangan ekonomi kampung tematik, penciptaan lapangan kerja baru

(8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	17 UMKM terdaftar, 36 produk unggulan, namun pemasaran masih terbatas	Peningkatan kapasitas UMKM, penguatan peran BUMDes
(9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Potensi kopi, temak, rosella yang besar namun belum dioptimalkan	Kemitraan dengan BRI, CSR, dan perguruan tinggi
(16) Penguatan Kelembagaan	BUMDes, Pokdarwis, dan pengurus kampung tematik telah terbentuk namun kapasitas masih terbatas	Penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola
(17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Telah terjalin kerjasama dengan BRI, UM, dan UB	Perluasan kemitraan strategis dan sinergi program

Sumber: Hasil analisis data SDGs dan FGD

Berdasarkan Tabel 2, kelima indikator prioritas tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan mendasar yang dihadapi Desa Sumberdem dan sejalan dengan program-program yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan desa. Indikator (1) Tanpa Kemiskinan menjadi prioritas utama mengingat tingginya angka pengangguran di desa ini. Indikator (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi dipilih karena potensi UMKM yang besar namun belum optimal pemasarannya. Indikator (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur relevan dengan pengembangan kampung tematik sebagai destinasi wisata dan pusat produksi. Indikator (16) Penguatan Kelembagaan dan (17) Kemitraan menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan program melalui penguatan kapasitas lokal dan perluasan jejaring kerjasama.

Sinkronisasi SDGs dengan Dokumen Perencanaan Desa

Hasil analisis terhadap dokumen RPJMDes 2019-2025 dan RKPDes 2022 menunjukkan bahwa pemerintah Desa Sumberdem telah memiliki arah pembangunan yang cukup jelas, namun masih terdapat kesenjangan dalam hal penguatan kelembagaan dan kemitraan. Sinkronisasi yang dilakukan oleh tim pengabdian bersama pemerintah desa dan pemangku kepentingan menghasilkan keterkaitan antara hasil analisis SDGs dengan dokumen perencanaan sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Sinkronisasi SDGs dengan RPJMDes dan RKPDes Desa Sumberdem

Dokumen Perencanaan	Target Pembangunan	Keterkaitan dengan SDGs	Keterkaitan dengan Identitas Lokal
RPJMDes 2019-2025	Meningkatkan perekonomian lokal desa	Indikator (1), (8), (17)	Pengembangan 6 kampung tematik berbasis potensi lokal
RKPDes 2022-2023	Atraksi wisata kampung tematik Sumberdem	Indikator (8), (9), (11)	Revitalisasi kampung tematik dan rebranding kopi Sumberdem
RKPDes 2022 (program baru)	Penguatan kelembagaan BUMDes dan Pokdarwis	Indikator (16)	Kapasitas pengelola kampung tematik dan pemasaran produk
RKPDes 2022 (program baru)	Perluasan kemitraan dengan perguruan tinggi dan swasta	Indikator (17)	Kerjasama riset, pendampingan, dan pengembangan produk

Sumber: Hasil sinkronisasi dokumen perencanaan

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa RPJMDes 2019-2025 telah mengarahkan pembangunan pada peningkatan ekonomi lokal, yang sejalan dengan indikator SDGs (1), (8), dan (17). RKPDes 2022-2023 menargetkan atraksi wisata kampung tematik, yang sejalan dengan indikator SDGs (8), (9), dan (11). Namun, masih terdapat kesenjangan pada aspek penguatan kelembagaan (indikator 16) dan kemitraan (indikator 17) yang belum terumuskan secara eksplisit dalam dokumen perencanaan. Melalui pendampingan tim pengabdian, pemerintah desa sepakat untuk memasukkan program penguatan kelembagaan BUMDes dan Pokdarwis serta perluasan kemitraan dengan perguruan tinggi dan sektor swasta sebagai program prioritas tahun 2022.

Salah satu bentuk sinkronisasi yang penting adalah dimasukkannya program pengembangan kampung kopi berbasis sejarah dan rebranding dalam RKPDes 2022. Berdasarkan temuan sejarah kopi Sumberdem sejak 1832, pemerintah desa bersama pengelola kampung kopi merumuskan strategi untuk memutus stigma negatif yang selama ini melekat pada kopi Kawi. Strategi yang dirumuskan meliputi: (1) penguatan narasi sejarah kopi Sumberdem melalui publikasi dan dokumentasi; (2) peningkatan kualitas produk melalui pelatihan dan pendampingan teknis; (3) sertifikasi dan branding produk kopi Sumberdem; serta (4) pengembangan kemitraan pemasaran dengan roastery dan kafe di Malang Raya.

Visualisasi dan Publikasi Perencanaan Desa

Hasil akhir dari kegiatan pengabdian adalah terproduksinya video perencanaan pembangunan desa yang memvisualisasikan arah pembangunan berbasis kekhasan lokal dan SDGs, serta publikasi melalui media massa dan media sosial. Video tersebut memuat profil desa, potensi enam kampung tematik, rencana pengembangan wisata kampung, serta peluang kemitraan dan investasi. Video ini direncanakan akan diunggah ke website desa dan platform YouTube untuk menjangkau khalayak yang lebih luas.

Kegiatan pengabdian ini telah dipublikasikan melalui tiga media massa, yaitu RRI Malang, Berita Malang Media, dan Malang News. Publikasi tersebut menyoroti upaya akademisi Universitas Brawijaya dalam memperkuat kekhasan kampung tematik dan memberdayakan ekonomi warga Desa Sumberdem melalui pendampingan berbasis SDGs. Selain itu, konten-konten promosi potensi desa juga disebarluaskan melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menarik minat wisatawan.



(Sumber: Dokumentasi luaran pengabdian)

Gambar 3. Publikasi Media Massa Hasil Kegiatan Pengabdian

Penyelesaian Masalah

Penguatan Identitas Lokal melalui Kampung Tematik dan Sejarah Kopi

Temuan tentang enam kampung tematik yang lahir dari inisiatif masyarakat (*bottom-up*) mengkonfirmasi hasil penelitian sebelumnya tentang pengembangan kampung tematik di wilayah Malang. Pemerintah Kota Malang melalui program kampung tematik menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif berbasis potensi lokal mampu mendorong pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pariwisata (Muluk et al., 2025). Kasus Kampung Sanan yang terkenal dengan produksi tempe dan Kampung Heritage Kayutangan yang dihargai karena nilai budaya dan historisnya menjadi bukti bahwa inovasi dan identitas lokal dapat memberdayakan masyarakat serta meningkatkan ekonomi kreatif. Temuan di Sumberdem memperkuat argumen bahwa kampung tematik yang dikelola secara partisipatif memiliki daya tahan yang lebih kuat karena masyarakat memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan program.

Keunikan temuan di Sumberdem terletak pada sejarah kopi yang terungkap sejak tahun 1832 dengan bukti arsip di Leiden, Belanda. Temuan ini sejalan dengan penelitian tentang penguatan identitas kopi robusta Kendal melalui sertifikasi Indikasi Geografis (IG) yang menunjukkan bahwa legitimasi sejarah dan asal-usul produk dapat meningkatkan daya saing dan nilai tambah ekonomi (Wibowo et al., 2021). Narasi sejarah dan bukti arsip kolonial menjadi instrumen efektif untuk memutus stigma negatif dan membangun citra produk yang kuat. Dalam kasus Sumberdem, penguatan narasi sejarah menjadi

fondasi strategi *rebranding* kopi untuk melawan stigma yang telah dibangun oleh para tengkulak dan *plat merah*.

Stigma negatif yang dihadapi kopi Sumberdem merupakan contoh nyata dari konstruksi sosial pasar yang dijelaskan dalam teori sosiologi ekonomi Bourdieu (1986) tentang bagaimana relasi kuasa dalam rantai pasok dapat menentukan harga dan persepsi kualitas. Para tengkulak dan *plat merah* memiliki kekuatan untuk mengkonstruksi realitas bahwa kopi dari wilayah Gunung Kawi termasuk Sumberdem berkualitas rendah, sehingga harga kopi Sumberdem selalu mengikuti harga kopi Dampit yang lebih rendah. Temuan ini mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi desa tidak hanya memerlukan peningkatan kualitas produk, tetapi juga perjuangan melawan struktur kuasa yang tidak adil dalam rantai pasok komoditas pertanian.

Tantangan Implementasi SDGs dan Pentingnya Kapasitas Lokal

Kendala yang dihadapi oleh *volunteer* SDGs Desa Sumberdem dalam pengumpulan data, terutama ketidakjujuran responden dalam menjawab pertanyaan pendapatan dan sikap apatis warga, sejalan dengan temuan Rahmaddhani dan Prasetyoningsih (2023) di Tirtanirmolo, Bantul. Penelitian tersebut menemukan bahwa hambatan utama implementasi SDGs Desa terletak pada tahap pengumpulan data, di mana kualitas sumber daya manusia aparatur desa dalam memahami teknologi dan pendekatan pengumpulan data masih menjadi kendala utama. Temuan di Sumberdem memperkuat argumen bahwa keberhasilan implementasi SDGs Desa sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa dan pendekatan yang digunakan dalam menjangkau masyarakat.

Sikap apatis dan ketidakjujuran warga dalam memberikan data mencerminkan rendahnya kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap program pendataan desa. Sebagaimana dijelaskan dalam teori modal sosial, kepercayaan merupakan elemen fundamental yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Putnam, 1993). Ketika masyarakat merasa bahwa pendataan tidak akan membawa dampak positif bagi kehidupan mereka, maka mereka cenderung tidak kooperatif. Oleh karena itu, upaya *volunteer* untuk melakukan pendekatan kultural melalui *cangkru'an* dan penyesuaian waktu wawancara merupakan strategi yang tepat untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Modal Sosial dan Keberhasilan Kemitraan Kelembagaan

Keberhasilan program kredit BRI dengan tingkat kredit macet nol di Desa Sumberdem merupakan bukti nyata tingginya modal sosial di desa ini. Temuan ini sejalan dengan penelitian tentang keterkaitan modal sosial dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Kuniran, Bojonegoro, yang menemukan bahwa modal sosial berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat sebesar 49,7% (Delisa et al., 2024). Ikatan sosial yang kuat, solidaritas, dan rasa tanggung jawab komunal di masyarakat Sumberdem tercermin dalam tingkat pengembalian kredit yang sangat baik.

Model kemitraan triple-helix yang terjalin antara pemerintah desa, BUMDes, BRI, dan akademisi sejalan dengan temuan penelitian tentang tata kelola kolaboratif untuk pembangunan desa berkelanjutan di Indonesia. Penelitian tersebut menghasilkan model yang menempatkan pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat sebagai aktor utama dalam forum deliberatif, dengan menekankan bahwa pembangunan desa berkelanjutan dapat dicapai melalui BUMDes yang dikelola secara partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada keseimbangan sosial, ekonomi, serta ekologi (Muluk et al., 2025).

Dalam kasus Sumberdem, peran BRI tidak hanya terbatas pada pemberian pinjaman modal, tetapi juga pendampingan melalui CSR berupa pelatihan dan pembelajaran bagi masyarakat. BUMDes berperan sebagai mitra pemasaran produk dan pendampingan perizinan, sementara pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dan regulator. Keterbukaan dan saling percaya antar ketiga pihak menjadi kunci keberhasilan sinergitas ini. Hal ini mengkonfirmasi temuan bahwa kolaborasi multipihak sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan lokal (Muluk et al., 2025).

Digitalisasi dan Kapasitas Aparatur Desa

Meskipun kegiatan pengabdian ini berhasil memproduksi video perencanaan dan publikasi melalui media sosial, temuan di lapangan menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa dalam mengelola teknologi masih terbatas. Hal ini sejalan dengan temuan Rahmaddhani dan Prasetyoningsih (2023) bahwa kualitas sumber daya manusia aparatur desa dalam memahami teknologi masih menjadi kendala utama dalam implementasi SDGs Desa. Keterbatasan ini menyebabkan aparatur desa masih kesulitan dalam pengelolaan website desa, editing video, dan pemanfaatan media sosial secara optimal untuk publikasi potensi desa.

Kesenjangan digital antara tuntutan kebijakan SDGs Desa yang berbasis teknologi dengan kapasitas aparatur desa menunjukkan perlunya investasi yang lebih serius dalam peningkatan kapasitas

digital aparaturnya. Sebagaimana dijelaskan oleh kebanyakan penelitian tentang digitalisasi desa, transformasi digital desa memerlukan pendekatan yang berkelanjutan, mulai dari pengembangan infrastruktur teknologi, pelatihan intensif kepada aparaturnya desa dan masyarakat, hingga penyusunan buku panduan penggunaan yang mudah dipahami.

Perencanaan Partisipatif dan Integrasi SDGs

Pendekatan partisipatif melalui FGD, SWOT, pemetaan stakeholder, dan kalender musim yang diterapkan dalam pengabdian ini sejalan dengan prinsip perencanaan partisipatif yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa dan kebijakan SDGs Desa. Penelitian tentang praktik perencanaan partisipatif di Indonesia menggunakan evaluasi berbasis SDGs menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan syarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Iskandar, 2020).

Hasil sinkronisasi antara data SDGs dengan RPJMDes dan RKPDes menunjukkan bahwa perencanaan berbasis data mampu menghasilkan program yang lebih kontekstual dan tepat sasaran. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa pendekatan integratif yang menggabungkan penggalian identitas lokal, analisis data SDGs, dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan desa mampu memutus kebiasaan perencanaan instan dan membangun perencanaan berbasis data yang berkelanjutan. Hal ini penting karena sebagaimana diingatkan oleh Suprianto (2022), pendataan SDGs Desa menjadi tahap awal yang penting bagi perencanaan pembangunan, karena menjadi dasar bagi penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Data yang dikumpulkan melalui SDGs Desa bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dengan data yang valid.

Kontribusi pengabdian ini terhadap pengembangan model pendampingan perencanaan desa terletak pada integrasi tiga elemen penting: (1) penguatan identitas lokal melalui penggalian sejarah dan potensi kampung tematik; (2) sinkronisasi SDGs dengan dokumen perencanaan desa; dan (3) pemanfaatan teknologi digital untuk visualisasi dan publikasi. Ketiga elemen ini saling memperkuat dan menciptakan dampak yang lebih berkelanjutan dibandingkan kegiatan pengabdian yang hanya fokus pada satu aspek tertentu. Sebagaimana disarankan oleh Ngabiyanto et al. (2025), pendampingan perencanaan pembangunan desa perlu mencakup keseluruhan siklus perencanaan, mulai dari pengumpulan data, analisis, perumusan program, hingga publikasi dan evaluasi.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian di Desa Sumberdem berhasil membuktikan bahwa pendekatan integratif dan partisipatif dalam penguatan identitas lokal dan sinkronisasi SDGs dapat mengatasi kebiasaan perencanaan instan dan membangun perencanaan berbasis data yang kontekstual dan berkelanjutan. Temuan-temuan yang diperoleh, terutama mengenai sejarah kopi 1832 dan keberhasilan kemitraan BUMDes-BRI dengan kredit macet nol, memberikan kontribusi berharga bagi pengembangan model pendampingan desa yang dapat direplikasi di desa-desa lain di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian di Desa Sumberdem menghasilkan lima kesimpulan utama. Pertama, pengabdian berhasil mengidentifikasi dan memperkuat kekhasan lokal berupa enam kampung tematik (Rosella, Bunga, KRPL, Toga, Ternak, Kopi) yang lahir dari inisiatif masyarakat, serta sejarah kopi Sumberdem yang telah diekspor ke Belanda sejak 1832. Temuan sejarah ini menjadi modal penting untuk strategi rebranding kopi guna memutus stigma negatif yang dibangun oleh tengkulak dan plat merah. Kedua, sinkronisasi SDGs dengan dokumen perencanaan menghasilkan lima indikator prioritas: pengentasan kemiskinan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri dan inovasi, penguatan kelembagaan, serta kemitraan yang menjadi dasar perumusan program RKPDes 2022 dan RPJMDes 2019-2025. Ketiga, modal sosial yang tinggi terbukti melalui program kredit BRI dengan tingkat kredit macet nol, didukung kepercayaan kuat, etos kerja warga, pendampingan CSR, dan inovasi pengolahan limbah. Model kemitraan triple-helix (pemerintah desa-BUMDes-BRI-akademisi) terbukti efektif. Keempat, pendekatan integratif berhasil memutus kebiasaan perencanaan instan (copy-paste) dan membangun perencanaan berbasis data melalui FGD, SWOT, pemetaan stakeholder, dan kalender musim. Kelima, luaran berupa video perencanaan dan publikasi di tiga media massa berhasil memvisualisasikan arah pembangunan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi.

Pengabdian ini memberikan kontribusi nyata bagi penguatan identitas lokal dan sinkronisasi SDGs dalam perencanaan desa partisipatif di era digital, serta memperkaya khazanah keilmuan sosiologi pedesaan dan perencanaan partisipatif.

Saran

Bagi Pemerintah Desa Sumberdem: Menindaklanjuti hasil sinkronisasi ke dalam program tahunan terukur, memprioritaskan rebranding kopi berbasis sejarah dengan melibatkan akademisi dan praktisi, memperkuat kapasitas BUMDes dan Pokdarwis melalui pelatihan manajemen usaha, pemasaran digital, dan pengurusan perizinan produk (P-IRT, BPOM, sertifikasi halal), mengembangkan sistem pendataan dan dokumentasi berkelanjutan, serta menjaga kemitraan dengan BRI, perguruan tinggi, dan sektor swasta.

Bagi Kegiatan Pengabdian Selanjutnya: Mengadopsi pendekatan integratif dan metode partisipatif yang disesuaikan dengan karakteristik desa, serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat secara inklusif termasuk kelompok marjinal.

Bagi Kebijakan Pengembangan Desa: Kementerian Desa dan pemerintah daerah perlu menyediakan pendampingan teknis yang lebih intensif dalam implementasi SDGs Desa, pelatihan kapasitas digital bagi aparatur dan volunteer, serta kebijakan insentif bagi desa yang berhasil mengimplementasikan SDGs secara efektif.

Bagi Penelitian Selanjutnya: Melakukan evaluasi dampak jangka panjang sinkronisasi SDGs terhadap kesejahteraan masyarakat, penelitian longitudinal, dan studi komparatif antar desa untuk memahami faktor keberhasilan implementasi SDGs di berbagai konteks lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada LPPM Universitas Brawijaya yang telah membiayai kegiatan ini melalui skema Hibah Pengabdian Masyarakat Mandiri. Terima kasih juga kepada Pemerintah Desa Sumberdem, khususnya Ibu Kepala Desa, Bapak Sekretaris Desa, Ibu Ketua BUMDes, Bapak Ketua Pengelola Kampung Kopi, seluruh *volunteer* SDGs, dan masyarakat Desa Sumberdem atas partisipasi aktifnya. Apresiasi disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian ini atas dedikasi dan kontribusinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., Flacke, J., Martinez, J., & van Maarseveen, M. F. A. M. (2020). Participatory planning practice in rural Indonesia: A sustainable development goals-based evaluation. *Community Development*, 51(3), 243–260. <https://doi.org/10.1080/15575330.2020.1765822>
- Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- Delisa, A., Prayitno, G., & Wicaksono, A. D. (2024). KETERKAITAN MODAL SOSIAL TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA KUNIRAN. *JURNAL TATA KOTA DAN DAERAH*, 16(2), 155–164.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaria, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Muluk, M. R. K., Novita, A. A., & Wiswayana, W. M. (2025). Collaborative Strategies for Community Empowerment: A Narrative Study on Thematic Village Development in Malang, Indonesia. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 6(1), 23–38. <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v6i1.649>
- Ngabiyanto, Munandar, A., Lestari, P., Rahman, Y. A., & Fauzi, A. S. (2025). STRENGTHENING VILLAGE SDGS-BASED DEVELOPMENT PROGRAM IMPLEMENTATION IN BLORA TO SUPPORT THE 2045 GOLDEN INDONESIA VISION. *Indonesian Journal of Devotion and Empowerment*, 7(1), 36–44.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Tradition and Modern Italy*. Princeton University Press.
- Rahmaddhani, T. W., & Prasetyoningsih, N. (2023). Achieving a Developing Village based on the Village Sustainable Development Goals in Tirtonirmolo Village, Bantul Regency. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 11–29. <https://doi.org/10.18196/jphk.v4i1.16043>
- Suprianto, T. (2022). Pendampingan Pemutakhiran Data SDGs Desa Tahun 2022 di Desa Ngadirejo Magelang. *Jurnal Bina Desa Volume*, 4(3), 409–418.

Wibowo, A., Listyorini, S., Alfaricha, T., & Pratama, H. B. (2021). OPTIMALISASI SERTIFIKASI INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI PENGUATAN IDENTITAS KOPI ROBUSTA KENDAL. *Harmoni*, 9(2), 44–50.